



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ROBBEN RICO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **664330**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 12.265.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m²/200 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m²/66 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 355.000.000
3. Tanah Seluas 200 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m²/45 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m²/220 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/120 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 840.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m²/40 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.320.000.000
8. Bangunan Seluas 21 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m²/45 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/350 m² di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 880.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m²/36 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	83.000.000
1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS/KARIMUN Tahun 2017, HASIL SENDIRI		
	Rp.	83.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	255.874.011
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	12.603.874.011
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	12.603.874.011

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.